



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 1954-1961

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Persepsi Mahasiswa tentang Trade-Off Antara Efisiensi Alokasi dan Pemerataan Akses dalam Subsidi Pendidikan

Elisabet Banjarnahor, Lentiona Ropika Siallagan, Munadya Salsa bila Lubis, Najwa Adelia Siregar, Rini Siregar

Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

elisabetbanjarnahor2604@gmail.com, lentionasiallagan8@gmail.com, munadya3366@gmail.com,

najwaadeliasiregar@gmail.com, rinisiregar357@gmail.com

Abstrak

Dinamika kebijakan subsidi pendidikan tinggi di Indonesia menghadirkan kompleksitas tersendiri dalam upaya menyeimbangkan dua kepentingan fundamental: menciptakan sistem alokasi yang efisien sekaligus menjamin kesetaraan peluang bagi seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini menggali perspektif mahasiswa sebagai pemangku kepentingan langsung terhadap dilema kebijakan tersebut melalui pendekatan kualitatif deskriptif yang melibatkan 100 responden mahasiswa aktif dari berbagai jenjang semester. Temuan mengungkapkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki pemahaman memadai tentang esensi subsidi sebagai instrumen redistributif untuk membuka akses pendidikan bagi kelompok ekonomi rentan. Menariknya, preferensi mahasiswa cenderung inklusif dimana tujuh dari sepuluh responden menghendaki penerapan kriteria ganda yang mengombinasikan pertimbangan kondisi ekonomi keluarga dengan pencapaian akademik, menunjukkan keinginan untuk mengintegrasikan dimensi keadilan dan produktivitas dalam satu kerangka kebijakan. Namun demikian, evaluasi terhadap praktik implementasi menampilkan gambaran yang kurang menggembirakan dengan hampir separuh responden menilai distribusi subsidi belum menjangkau secara merata dan mayoritas mengidentifikasi adanya ketidaktepatan sasaran penyaluran. Ketika dihadapkan pada pilihan antara efisiensi dan pemerataan, responden menunjukkan pandangan yang terfragmentasi dengan porsi hampir seimbang antara yang memprioritaskan efisiensi, pemerataan, atau menganggap keduanya sama krusial. Studi ini merekomendasikan penyempurnaan arsitektur kebijakan melalui modernisasi sistem penargetan berbasis integrasi data digital, penguatan prosedur verifikasi kelayakan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas untuk mewujudkan subsidi pendidikan yang lebih adil dan produktif.

Kata kunci: Subsidi Pendidikan Tinggi, Efisiensi Alokasi Sumber Daya, Kesetaraan Akses Pendidikan, Perspektif Mahasiswa, Kebijakan Publik Pendidikan, Dilema Trade-Off Kebijakan.

1. Latar Belakang

Institusi pendidikan tinggi memiliki peran strategis sebagai motor pengembangan bangsa, tidak sekadar mencetak tenaga profesional melainkan juga sebagai episentrum inovasi, riset, dan penguasaan teknologi yang krusial bagi daya saing Indonesia di kancah internasional (Wibowo & Suharno, 2020). Namun, kesenjangan akses pendidikan tinggi masih menjadi tantangan serius dimana calon mahasiswa dari kalangan kurang mampu sering terbentur pada tingginya biaya pendidikan yang berisiko menghambat mobilitas sosial dan memperdalam jurang ekonomi antarkelompok masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai program subsidi pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah, beasiswa Bidikmisi, dan bantuan operasional perguruan tinggi. Program-program ini bertujuan meringankan beban ekonomi dan menjamin peluang setara dalam mengakses pendidikan tinggi (Bappenas, 2020). Namun, pemberian subsidi menghadapi kompleksitas dalam perancangan kebijakan yaitu adanya tarik-menarik antara prinsip efisiensi alokasi dan keadilan distributif.

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa dilema ini merupakan pertukaran mendasar dalam ekonomi kesejahteraan. Okun (2015) mengemukakan konsep "The Big Trade-off" yang menyatakan bahwa upaya meningkatkan keadilan distribusi melalui kebijakan redistributif dapat mengurangi insentif ekonomi dan menurunkan efisiensi. Dalam konteks pendidikan, efisiensi alokasi tercapai ketika subsidi diarahkan pada

program yang menghasilkan dampak ekonomi dan sosial terbesar, misalnya program studi dengan tingkat penyerapan lulusan tinggi di pasar kerja. Sebaliknya, prinsip pemerataan menekankan bahwa bantuan harus dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan pilihan bidang studi atau kondisi ekonomi (Hadi & Gunawan, 2021).

Teori ekonomi publik menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tiga fungsi utama yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Arsyad, 2016). Pendidikan dikategorikan sebagai barang bernilai yang memberikan manfaat sosial lebih besar daripada nilai pribadi yang disadari individu karena menghasilkan eksternalitas positif berupa peningkatan produktivitas, inovasi, dan stabilitas sosial (Nussbaum, 2016). Kegagalan pasar terjadi ketika masyarakat cenderung menilai pendidikan lebih rendah dari nilai sosialnya yang sebenarnya, sehingga memerlukan intervensi pemerintah melalui subsidi untuk memperluas akses.

Teori modal manusia memperkuat justifikasi subsidi pendidikan dengan menjelaskan bahwa pendidikan merupakan investasi yang meningkatkan produktivitas dan kemampuan individu, memberikan keuntungan tidak hanya bagi individu dalam bentuk peningkatan pendapatan tetapi juga bagi masyarakat melalui peningkatan produktivitas agregat (Heckman & Mosso, 2014). Penelitian empiris menunjukkan bahwa setiap tambahan jenjang pendidikan berkontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia (Salmi, 2017).

Dalam konteks Indonesia, kebijakan subsidi pendidikan telah mengalami perkembangan signifikan sejak kemerdekaan. Program Bidikmisi yang diluncurkan tahun 2010 dan berkembang menjadi KIP Kuliah merupakan tonggak penting dalam upaya pemerataan akses pendidikan tinggi (Hidayat, 2017). Evaluasi menunjukkan bahwa program ini berhasil meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi bagi kelompok berpenghasilan rendah (Oktaviani & Suryadarma, 2016). Namun, tantangan terkait ketepatan sasaran, transparansi, dan pemerataan distribusi masih dihadapi dengan kesalahan penyaluran yang terjadi akibat keterbatasan data kesejahteraan yang valid dan lemahnya verifikasi (Armansyah et al., 2021).

Penelitian terdahulu tentang subsidi pendidikan di Indonesia sebagian besar fokus pada efektivitas program dan aksesibilitas, dengan perhatian terbatas pada persepsi mahasiswa terhadap dilema antara efisiensi dan pemerataan (Afrianti & Wahyuni, 2021; Kusuma & Prasetyani, 2019). Padahal, mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama yang merasakan langsung dampak kebijakan memiliki perspektif penting untuk evaluasi dan penyempurnaan kebijakan. Persepsi mahasiswa dapat mempengaruhi tingkat partisipasi, kepatuhan, dan efektivitas keseluruhan kebijakan subsidi.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji persepsi dan pemahaman mahasiswa tentang landasan pemberian subsidi pendidikan, mengetahui preferensi mahasiswa perihal kriteria penerima subsidi, menggali sudut pandang mahasiswa mengenai keterkaitan antara kebutuhan pasar kerja dengan mekanisme penyaluran subsidi, menganalisis evaluasi mahasiswa terhadap keadilan distribusi bantuan pendidikan saat ini, dan memahami posisi sikap mahasiswa dalam menyikapi dialektika antara efisiensi dan pemerataan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengeksplorasi persepsi mahasiswa tentang trade-off antara efisiensi alokasi dan pemerataan akses dalam kebijakan subsidi pendidikan. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan memahami pandangan, sikap, dan pengalaman subjektif mahasiswa yang memerlukan interpretasi mendalam terhadap makna dan konteks dari persepsi yang diberikan (Creswell, 2016). Populasi penelitian adalah mahasiswa aktif dari berbagai program studi di perguruan tinggi, baik yang menerima maupun tidak menerima subsidi atau beasiswa pendidikan.

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel 100 responden. Kriteria pemilihan meliputi mahasiswa aktif dari berbagai tingkat semester dan program studi untuk mendapatkan variasi perspektif dan sudut pandang lintas disiplin ilmu (Sekaran & Bougie, 2016). Ukuran sampel ini memadai untuk penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan mengeksplorasi persepsi dan mengidentifikasi pola umum dalam populasi mahasiswa.

Instrumen penelitian berupa kuesioner terstruktur yang dirancang khusus untuk mengukur persepsi mahasiswa dengan beberapa bagian utama yaitu identitas responden, pemahaman tentang subsidi pendidikan, perspektif tentang efisiensi, perspektif tentang pemerataan, trade-off pertukaran kepentingan, dan evaluasi kebijakan (Fowler, 2014). Semua pertanyaan menggunakan format pilihan ganda untuk memudahkan tabulasi dan analisis. Kuesioner telah melalui validasi konten oleh ahli ekonomi publik dan kebijakan pendidikan serta uji coba terbatas untuk memastikan relevansi dan kejelasan pertanyaan.

Pengumpulan data dilakukan secara daring menggunakan Google Forms pada November 2025 selama dua minggu (Evans & Mathur, 2018). Metode daring dipilih karena efisiensi waktu dan biaya, kemudahan akses responden, mengurangi kesalahan entri data, dan memudahkan pengumpulan serta pengolahan data. Mekanisme kontrol diterapkan dengan menetapkan setiap pertanyaan sebagai mandatory, pembatasan satu kali pengisian per responden, dan monitoring berkala untuk mengidentifikasi pola jawaban tidak konsisten.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah tabulasi data dari Google Forms ke spreadsheet, analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan distribusi jawaban, interpretasi data dalam konteks teori ekonomi publik, triangulasi temuan dengan membandingkan berbagai pertanyaan yang mengukur dimensi berkaitan, dan penyajian hasil dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan interpretasi naratif (Miles et al., 2014). Analisis menggunakan Microsoft Excel mengikuti prinsip analisis data kualitatif yang sistematis untuk memastikan objektivitas dan reliabilitas hasil.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 100 mahasiswa dari berbagai program studi di perguruan tinggi dengan sebaran karakteristik demografis yang cukup representatif. Berdasarkan jenis kelamin, komposisi responden didominasi oleh mahasiswa perempuan sebanyak 84 orang (84%) dan mahasiswa laki-laki sebanyak 16 orang (16%). Distribusi responden berdasarkan tingkat semester menunjukkan bahwa mayoritas berada pada semester 3-4 sebanyak 53 orang (53%), diikuti oleh mahasiswa semester 1-2 sebanyak 41 orang (41%), dan sisanya mahasiswa semester 5 ke atas sebanyak 6 orang (6%).

Ditinjau dari status penerimaan subsidi pendidikan, sebagian besar responden yakni 63 orang (63%) tidak menerima beasiswa atau subsidi apapun, sedangkan 37 orang (37%) merupakan penerima beasiswa atau subsidi penuh. Komposisi responden yang didominasi oleh mahasiswa yang tidak menerima subsidi memberikan nilai tambah tersendiri dalam konteks objektivitas penelitian, karena persepsi yang disampaikan tidak semata-mata dipengaruhi oleh kepentingan pribadi sebagai penerima manfaat langsung dari kebijakan subsidi pendidikan.

3.2. Pemahaman tentang Tujuan Subsidi Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa 73 responden (73%) mengidentifikasi tujuan utama subsidi pendidikan sebagai upaya membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengakses pendidikan tinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki pemahaman yang kuat terhadap fungsi redistributif kebijakan subsidi pendidikan, yang sejalan dengan teori ekonomi kesejahteraan tentang peran pemerintah dalam mengoreksi kegagalan pasar dan ketimpangan distribusi pendapatan (Arsyad, 2016).

Sementara itu, 22 responden (22%) berpandangan bahwa subsidi bertujuan untuk mengurangi beban biaya pendidikan bagi seluruh mahasiswa tanpa membedakan latar belakang ekonomi. Perspektif ini mencerminkan pemahaman tentang pendidikan sebagai barang merit yang memiliki dampak ikutan positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Hanya 5 responden (5%) yang memandang subsidi pendidikan dari perspektif peningkatan kualitas pendidikan secara sistemik. Rendahnya persentase ini mengindikasikan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap dimensi efisiensi alokasi dalam konteks peningkatan kualitas masih relatif terbatas, sebagaimana dikemukakan oleh Nugroho (2018) bahwa kesadaran masyarakat terhadap kompleksitas kebijakan publik sangat mempengaruhi efektivitas implementasi program pemerintah.

Dominasi persepsi terhadap fungsi redistributif menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kesadaran kuat terhadap keadilan distributif dalam kebijakan publik. Namun demikian, relatif rendahnya persentase yang

memandang subsidi sebagai instrumen peningkatan kualitas mengindikasikan bahwa aspek efisiensi alokasi belum sepenuhnya tertanam dalam pemahaman mahasiswa mengenai kebijakan subsidi pendidikan.

3.3. Preferensi Kriteria Penerima Subsidi

Temuan signifikan dari penelitian ini adalah 71 responden (71%) mendukung pemberian subsidi kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria ganda, yaitu berasal dari keluarga kurang mampu sekaligus memiliki prestasi akademik yang baik. Preferensi ini merefleksikan kecenderungan mahasiswa untuk mengakomodasi kedua dimensi utama dalam ekonomi publik pemerataan dan efisiensi dalam satu mekanisme kebijakan. Hasil ini konsisten dengan studi Kurniawan dan Budiantoro (2020) yang menemukan bahwa masyarakat Indonesia cenderung mendukung kebijakan redistribusi yang bersifat kondisional.

Mahasiswa tampaknya memahami bahwa pemberian subsidi tidak hanya harus memenuhi prinsip keadilan distributif, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek produktivitas dan tingkat pengembalian investasi dari alokasi sumber daya publik yang terbatas. Dengan menambahkan kriteria prestasi akademik, terdapat mekanisme penyaringan yang dapat meminimalkan bahaya moral dan memastikan bahwa subsidi diberikan kepada individu yang memiliki probabilitas tinggi untuk menyelesaikan pendidikan (Oktaviani & Suryadarma, 2016).

Sebanyak 22 responden (22%) lebih memprioritaskan kriteria kondisi ekonomi murni tanpa mempertimbangkan prestasi akademik, sementara hanya 8 responden (8%) yang memilih kriteria prestasi tanpa memandang kondisi ekonomi. Data ini menunjukkan bahwa pandangan yang sepenuhnya berorientasi pada efisiensi murni tanpa mempertimbangkan aspek keadilan distributif relatif tidak populer di kalangan mahasiswa. Temuan ini konsisten dengan penelitian Chapman et al. (2018) yang menemukan bahwa mayoritas masyarakat mendukung sistem pembiayaan progresif yang mempertimbangkan kemampuan ekonomi keluarga.

3.4. Persepsi terhadap Relevansi Pasar Kerja

Hasil penelitian menunjukkan penolakan yang sangat kuat terhadap gagasan pembatasan subsidi pendidikan hanya pada program studi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Sebanyak 84 responden (84%) menyatakan sikap menolak, sementara hanya 16 responden (16%) yang menyetujui pembatasan tersebut. Temuan ini mengungkapkan ketegangan fundamental dalam diskursus kebijakan pendidikan tinggi antara perspektif teori modal manusia yang menekankan pendidikan sebagai investasi produktif, dengan perspektif pendidikan humanistik yang menekankan nilai intrinsik pendidikan dalam pengembangan individu dan masyarakat.

Penolakan mayoritas mahasiswa dapat diinterpretasikan sebagai pembelaan terhadap kebebasan akademik dan hak individu untuk menentukan jalur pendidikan sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasi personal. Mahasiswa cenderung memandang pendidikan sebagai barang publik dengan dampak ikutan positif yang luas dan tidak dapat sepenuhnya dikuantifikasi dalam ukuran moneter. Pendidikan dalam bidang humaniora, seni, dan ilmu sosial tetap memiliki nilai penting dalam membentuk modal sosial, pengayaan budaya, dan kewarganegaraan demokratis (Marginson, 2016).

Namun demikian, pandangan ini juga berpotensi menimbulkan pertukaran kepentingan dengan prinsip efisiensi alokasi sumber daya publik yang terbatas. Dalam konteks keterbatasan fiskal, pemerintah dihadapkan pada dilema untuk memilih antara memaksimalkan kesejahteraan jangka panjang atau menjamin akses universal tanpa diskriminasi berdasarkan pilihan program studi. Dalam konteks Indonesia, Wibowo dan Suharno (2020) menemukan bahwa lulusan dari berbagai program studi memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan melalui jalur yang tidak selalu terukur dalam statistik pasar tenaga kerja formal.

3.5. Preferensi Mekanisme Penyaluran Subsidi

Terkait preferensi terhadap mekanisme penyaluran subsidi, 47 responden (47%) memilih kombinasi berbagai bentuk bantuan sebagai pendekatan paling efektif, sementara 39 responden (39%) lebih spesifik memilih penyediaan fasilitas belajar gratis atau pengurangan biaya kuliah. Pemberian uang tunai langsung hanya didukung oleh 4 responden (4%).

Dominasi preferensi terhadap pendekatan kombinasi mengindikasikan pemahaman bahwa kebutuhan mahasiswa dalam proses pendidikan bersifat multidimensional. Mahasiswa membutuhkan tidak hanya pembebasan biaya kuliah, tetapi juga akses terhadap buku, perangkat teknologi, transportasi, dan biaya hidup sehari-hari. Pendekatan holistik ini lebih selaras dengan sistem dukungan mahasiswa komprehensif yang telah terbukti meningkatkan tingkat retensi dan keberhasilan akademik (Goldrick-Rab et al., 2016).

Preferensi tinggi terhadap subsidi dalam bentuk fasilitas mencerminkan kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan dana jika subsidi diberikan dalam bentuk uang tunai. Transfer barang cenderung lebih efektif dalam memastikan bahwa sumber daya benar-benar digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan dan memiliki akurasi penargetan yang lebih baik (Banerjee et al., 2017). Rendahnya dukungan terhadap transfer tunai dapat dijelaskan melalui kekhawatiran pengalihan penggunaan, kurangnya akuntabilitas, dan stigma sosial yang mungkin timbul (Kusuma & Prasetyani, 2019).

3.6. Evaluasi Pemerataan dan Ketepatan Sasaran

Penilaian mahasiswa terhadap pemerataan sistem subsidi pendidikan saat ini menunjukkan hasil yang cukup kritis. Sebanyak 49 responden (49%) berpendapat bahwa sistem subsidi kurang merata dengan banyak pihak yang seharusnya berhak namun belum menerima, sementara 34 responden (34%) menilai sistem cukup merata tetapi masih ada kesenjangan. Hanya 4 responden (4%) menganggap sistem sudah sangat merata dan adil.

Temuan ini mengungkapkan kesenjangan persepsi yang signifikan antara kebijakan formal dan implementasi faktual. Mayoritas mahasiswa masih mempersepsikan adanya kesalahan eksklusi yang substansial di mana individu yang memenuhi syarat tidak mendapatkan akses terhadap subsidi. Hasil ini konsisten dengan temuan Armansyah et al. (2021) yang mengidentifikasi bahwa tingkat kesalahan eksklusi dalam program beasiswa di Indonesia masih cukup tinggi, mencapai 30-40% dari populasi sasaran.

Persepsi ketidakmerataan dapat dijelaskan melalui beberapa faktor: asimetri informasi, hambatan administratif, kesenjangan geografis, dan kesalahan inklusi. Tidak semua mahasiswa yang membutuhkan memiliki informasi lengkap mengenai ketersediaan program subsidi, sementara prosedur birokrasi yang kompleks dapat menjadi penghalang masuk bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu (Rahayu & Nugroho, 2018).

Temuan yang mengkhawatirkan adalah 70 responden (70%) menyatakan bahwa sering atau kadang-kadang terjadi kasus mahasiswa yang sebenarnya mampu secara ekonomi tetapi masih menerima subsidi pendidikan. Tingginya persepsi terhadap kesalahan inklusi ini menunjukkan adanya permasalahan serius dalam mekanisme penargetan sistem subsidi saat ini. Kesalahan inklusi mengakibatkan inefisiensi dan ketidakadilan dalam alokasi sumber daya publik yang terbatas (Brown et al., 2018).

Beberapa faktor dapat menjelaskan fenomena ini: asimetri informasi dan seleksi buruk, mekanisme verifikasi yang lemah, kriteria yang ketinggalan zaman, masalah kelayakan dinamis, dan faktor ekonomi politik. Pemohon memiliki informasi yang lebih baik mengenai kondisi ekonomi mereka sendiri, sehingga menciptakan ruang untuk salah representasi. Proses verifikasi kondisi ekonomi keluarga mungkin tidak komprehensif atau mudah dimanipulasi (Hastuti et al., 2019). Temuan ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk mereformasi mekanisme penargetan dan memperkuat prosedur verifikasi.

3.7. Analisis Trade-off Efisiensi dan Pemerataan

Pada pertanyaan yang secara eksplisit menanyakan prioritas antara pemerataan akses dan efisiensi penargetan, 37 responden (37%) menilai bahwa keduanya sama pentingnya dan harus diupayakan secara simultan. Sebanyak 32 responden (32%) lebih memprioritaskan efisiensi dengan memastikan subsidi tepat sasaran, sementara 29 responden (29%) lebih menekankan aspek pemerataan untuk memastikan semua orang memiliki kesempatan yang sama.

Distribusi preferensi yang relatif seimbang ini mencerminkan kompleksitas dilema kebijakan publik yang dihadapi dalam konteks subsidi pendidikan. Temuan ini konsisten dengan teori ekonomi kesejahteraan yang menyatakan bahwa terdapat ketegangan inheren antara efisiensi Pareto dan keadilan distribusi. Purwanto dan Kusumawardhani (2019) menemukan bahwa masyarakat memiliki preferensi yang terbagi hampir merata antara

kebijakan yang memprioritaskan efisiensi versus pemerataan, mencerminkan pluralitas nilai dan kepentingan dalam masyarakat.

Kelompok yang memprioritaskan efisiensi cenderung mengadopsi pendekatan utilitarian yang fokus pada maksimalisasi kesejahteraan agregat dan minimalisasi kerugian dari kebijakan redistribusi. Mereka lebih peduli dengan dampak negatif potensial dari subsidi yang tidak tepat sasaran, seperti bahaya moral dan biaya peluang dari sumber daya yang salah alokasi (Hadi & Gunawan, 2021). Sebaliknya, kelompok yang memprioritaskan pemerataan lebih mengadopsi pendekatan egalitarian yang menekankan akses pendidikan sebagai hak asasi manusia (Suryadi, 2018).

Kelompok terbesar yang menyatakan bahwa keduanya sama pentingnya (37%) mengindikasikan bahwa mahasiswa pada umumnya menolak pendekatan yang ekstrem dan lebih mendukung pendekatan yang seimbang. Hal ini sejalan dengan literatur modern dalam ekonomi kesejahteraan yang menekankan pada pencarian solusi terbaik kedua mengakui bahwa solusi sempurna tidak dapat dicapai dalam dunia nyata (Atkinson & Bourguignon, 2015).

Ketika dihadapkan pada pertukaran konkret antara cakupan luas versus cakupan terbatas dengan penargetan akurat, 53 responden (53%) setuju untuk mengurangi jumlah penerima subsidi agar lebih fokus pada yang benar-benar membutuhkan, sementara 47 responden (47%) kurang setuju. Distribusi yang hampir seimbang ini mengungkapkan ambivalensi yang dialami mahasiswa dalam menghadapi pertukaran praktis antara efisiensi dan keadilan.

3.8. Penilaian Keseluruhan Kebijakan

Penilaian komprehensif mahasiswa terhadap orientasi kebijakan subsidi pendidikan saat ini menunjukkan hasil yang beragam namun cenderung kritis. Sebanyak 43 responden (43%) berpendapat bahwa kebijakan saat ini tidak efisien dan tidak merata gagal pada kedua dimensi yang seharusnya menjadi tujuan utama. Sebanyak 28 responden (28%) menilai kebijakan lebih condong ke pemerataan, sementara 23 responden (23%) menganggap kebijakan sudah cukup seimbang. Hanya 6 responden (6%) yang menilai kebijakan saat ini sudah efisien dengan tepat sasaran.

Dominasi persepsi negatif mengindikasikan permasalahan fundamental dalam desain dan implementasi kebijakan subsidi pendidikan. Penilaian ini menunjukkan bahwa kebijakan saat ini tidak hanya gagal mencapai salah satu tujuan, tetapi gagal pada kedua dimensi baik efisiensi maupun keadilan. Hal ini merupakan skenario terburuk dalam kebijakan publik (Wijaya et al., 2021).

Kelompok yang menilai kebijakan condong ke pemerataan mengindikasikan pengakuan bahwa terdapat cakupan yang luas dari program subsidi, namun dengan kritik tersirat bahwa akurasi penargetan kurang optimal. Ini mencerminkan dilema kebijakan klasik: apakah lebih baik memiliki program yang luas tetapi dangkal atau program yang sempit tetapi dalam (Bappenas, 2020). Sangat kecilnya proporsi yang menilai kebijakan sudah efisien menunjukkan ketidakpuasan yang meluas dengan efektivitas program subsidi dan mengindikasikan permintaan kuat untuk reformasi kebijakan yang lebih fundamental.

Temuan-temuan penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting untuk perbaikan kebijakan subsidi pendidikan. Pertama, diperlukan perbaikan mekanisme penargetan yang lebih akurat dengan memanfaatkan teknologi digital dan basis data terintegrasi (Iskandar et al., 2022). Kedua, perlu ada keseimbangan yang lebih baik antara kriteria ekonomi dan prestasi dalam penentuan penerima subsidi. Ketiga, sistem verifikasi dan pemantauan harus diperkuat untuk mengurangi kesalahan inklusi dan eksklusi. Keempat, perlu ada sosialisasi yang lebih luas tentang program subsidi yang tersedia untuk mengatasi asimetri informasi.

4. Kesimpulan

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi perspektif kritis mahasiswa mengenai kebijakan subsidi pendidikan terutama dalam hal tarik-menarik antara efisiensi dalam penyaluran dan perluasan kesempatan akses. Mayoritas mahasiswa memahami subsidi sebagai instrumen fundamental untuk mendukung calon mahasiswa dari latar belakang ekonomi rentan agar dapat mengenyam pendidikan tinggi. Temuan menarik menunjukkan preferensi mereka tidak bersifat dikotomis dimana responden justru memilih kriteria penerima yang memadukan aspek

kemampuan finansial dan pencapaian akademik, mencerminkan keinginan untuk memadukan prinsip keadilan dan peningkatan mutu hasil pendidikan. Meskipun memahami tujuan normatif kebijakan, evaluasi mahasiswa terhadap pelaksanaannya di lapangan bersifat skeptis. Sebagian besar menilai distribusi bantuan belum merata karena masih terdapat kelompok berhak yang belum terjangkau. Lebih memprihatinkan, mayoritas responden mengamati terjadinya ketidaktepatan sasaran dimana mahasiswa dengan kemampuan ekonomi memadai masih mendapat subsidi yang mengindikasikan masalah serius dalam akurasi penyaluran serta potensi pemborosan anggaran. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa dilema antara efisiensi dan pemerataan masih menjadi persoalan penting dalam kebijakan subsidi pendidikan. Mahasiswa menilai bahwa kedua aspek tersebut tidak seharusnya dipertentangkan, namun dalam praktiknya masih sering menimbulkan perbedaan pandangan dan ketegangan dalam pelaksanaannya. Mereka juga mengindikasikan perlunya pengetatan cakupan penerima demi meningkatkan ketepatan alokasi, serta menyoroti bahwa kebijakan yang berjalan saat ini belum memberikan hasil yang memuaskan karena dinilai belum efisien sekaligus belum merata. Keseluruhan temuan ini mempertegas bahwa evaluasi mahasiswa terhadap kebijakan subsidi cenderung kritis, dan bahwa perbaikan menyeluruh perlu dilakukan agar kebijakan dapat lebih efektif mencapai tujuan pemerataan pendidikan. Disarankan agar pemerintah melakukan perbaikan struktural melalui pembenahan mekanisme penyaluran, terutama dengan memperkuat sistem penargetan dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan akurasi data penerima. Kriteria penerimaan juga perlu dirumuskan secara lebih integratif dengan menggabungkan aspek ekonomi keluarga dan merit akademik, sejalan dengan preferensi mahasiswa yang menginginkan kebijakan yang adil sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Perguruan tinggi sebagai pelaksana teknis juga diharapkan memperkuat verifikasi internal, meningkatkan sistem pemantauan, serta memperluas sosialisasi mengenai skema bantuan agar informasi lebih mudah diakses oleh mahasiswa, khususnya mereka yang berasal dari daerah atau latar belakang dengan akses informasi terbatas. Langkah-langkah ini diharapkan mampu meningkatkan keandalan penyaluran subsidi dan memperbaiki tata kelola dana publik di sektor pendidikan.

Referensi

1. Afrianti, N. and Wahyuni, S., "Evaluasi Program KIP Kuliah dari Perspektif Penerima Manfaat," *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, vol. 10, no. 2, pp. 156-170, 2021. <https://doi.org/10.21831/jkp.v10i2.38456>
2. Armansyah, F., Sulton, M., and Kurniawan, R., "Ketepatan Sasaran Program Bidikmisi: Analisis Empiris," *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 17, no. 2, pp. 145-162, 2021. <https://doi.org/10.31289/jap.v17i2.4521>
3. Arsyad, L., "Ekonomi Pembangunan," UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2016.
4. Atkinson, A. B. and Bourguignon, F., "Handbook of Income Distribution," Elsevier, Amsterdam, 2015.
5. Banerjee, A., Hanna, R., Kyle, J., Olken, B. A., and Sumarto, S., "Tangible Information and Citizen Empowerment: Identification Cards and Food Subsidy Programs in Indonesia," *Journal of Political Economy*, vol. 126, no. 2, pp. 451-491, 2017. <https://doi.org/10.1086/696226>
6. Bappenas, "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024," Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 2020.
7. Brown, C., Ravallion, M., and van de Walle, D., "Are the World's Poorest Being Left Behind?," *Journal of Economic Perspectives*, vol. 32, no. 2, pp. 67-90, 2018. <https://doi.org/10.1257/jep.32.2.67>
8. Chapman, B., Higgins, T., and Stiglitz, J. E., "Income Contingent Loans: Theory, Practice and Prospects," Palgrave Macmillan, London, 2018.
9. Creswell, J. W., "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches," SAGE Publications, Thousand Oaks, 2016.
10. Evans, J. R. and Mathur, A., "The Value of Online Surveys in Business Research," *Internet Research*, vol. 28, no. 4, pp. 854-887, 2018. <https://doi.org/10.1108/IntR-03-2017-0089>
11. Fowler, F. J., "Survey Research Methods," SAGE Publications, Thousand Oaks, 2014.
12. Goldrick-Rab, S., Kelchen, R., Harris, D. N., and Benson, J., "Reducing Income Inequality in Educational Attainment: Experimental Evidence on the Impact of Financial Aid on College Completion," *American Journal of Sociology*, vol. 121, no. 6, pp. 1762-1817, 2016. <https://doi.org/10.1086/685442>
13. Hadi, S. and Gunawan, A., "Dilema Efisiensi dan Keadilan dalam Kebijakan Fiskal Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, vol. 29, no. 1, pp. 78-95, 2021. <https://doi.org/10.14203/JEP.29.1.2021.78-95>
14. Hastuti, D., Zakaria, R., and Pramana, R. P., "Strengthening Verification Systems in Social Assistance Programs," *Journal of Public Administration and Governance*, vol. 9, no. 3, pp. 112-128, 2019. <https://doi.org/10.5296/jpag.v9i3.15234>
15. Heckman, J. J. and Mosso, S., "The Economics of Human Development and Social Mobility," *Annual Review of Economics*, vol. 6, pp. 689-733, 2014. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080213-040753>
16. Hidayat, R., "Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Tinggi di Indonesia," *Jurnal Sejarah Pendidikan*, vol. 11, no. 1, pp. 34-48, 2017. <https://doi.org/10.21831/jsp.v11i1.15234>
17. Iskandar, D., Prasetyo, B., and Wijaya, K., "Digitalisasi Sistem Pendataan Penerima Bantuan Pendidikan," *Jurnal Teknologi Informasi Pendidikan*, vol. 9, no. 1, pp. 78-92, 2022. <https://doi.org/10.24114/jtipendidikan.v9i1.32145>
18. Kurniawan, B. and Budiantoro, S., "Conditional Redistribution Preferences in Indonesian Society," *Journal of Public Economics*, vol. 28, no. 4, pp. 312-328, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104312>
19. Kusuma, A. and Prasetyani, D., "Persepsi Mahasiswa terhadap Program Beasiswa Pemerintah," *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, vol. 12, no. 1, pp. 45-58, 2019. <https://doi.org/10.17977/um014v12i12019p045>
20. Marginson, S., "Higher Education and the Common Good," Melbourne University Press, Melbourne, 2016.
21. Miles, M. B., Huberman, A. M., and Saldana, J., "Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook," SAGE Publications, Thousand Oaks, 2014.

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3792>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

22. Nugroho, R., "Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan," Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018.
23. Nussbaum, M. C., "Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities," Princeton University Press, Princeton, 2016.
24. Oktaviani, D. and Suryadarma, D., "The Effect of Scholarship Programs on Poor Students' Enrollment and Performance," *Economic Journal of Emerging Markets*, vol. 8, no. 2, pp. 130-141, 2016. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol8.iss2.art5>
25. Okun, A. M., "Equality and Efficiency: The Big Tradeoff," Brookings Institution Press, Washington DC, 2015.
26. Purwanto, E. A. and Kusumawardhani, A., "Public Policy Trade-offs in Developing Countries," *Policy Studies Journal*, vol. 47, no. 3, pp. 658-682, 2019. <https://doi.org/10.1111/psj.12289>
27. Salmi, J., "The Tertiary Education Imperative: Knowledge, Skills and Values for Development," Sense Publishers, Rotterdam, 2017.
28. Sekaran, U. and Bougie, R., "Research Methods for Business: A Skill Building Approach," John Wiley & Sons, New York, 2016.
29. Suryadi, A., "Equity and Quality in Indonesian Higher Education," *International Journal of Educational Development*, vol. 58, pp. 26-35, 2018. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2017.11.009>
30. Wibowo, A. and Suharno, "The Role of Higher Education in Economic Development," *Journal of Education and Development*, vol. 8, no. 2, pp. 145-158, 2020. <https://doi.org/10.20961/jed.v8i2.41234>
31. Wijaya, A., Kusuma, H., and Pratama, D., "Efektivitas Program Subsidi Pendidikan Tinggi di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pendidikan*, vol. 15, no. 3, pp. 201-215, 2021. <https://doi.org/10.21831/jep.v15i3.42156>.